BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung berdiri pada tanggal 20 April 1641, bertepatan dengan keluarnya "Serat Piyagem" Sultan Ageng Mataram yang menyebutkan ping songo tahun Alif bulan Muharam. Pada saat itu pula Tumenggung Wiraangun-angun menjabat sebagai Bupati Bandung yang pertama.

Dalam perhitungan Masehi, *"Ping Sangan Bulan Muharam Tahun Alip"* tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April 1641. Perhitungan itu diungkapkan salah seorang Arsiparis Belanda yang bernama F. De Haan. Perhitungan F. De Haan seperti tertulis dalam buku sejarah Kabupaten Bandung yang disusun BPID dan UNPAD tahun 2003, demikian sederhana. Menurutnya, tahun Alip dalam Amanac Jawa dimulai tahun 1633 Masehi. Tahun – tahun Alip yang dialami selama Pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645) ialah 1633 dan 1641. Biasanya kata F. De Haan segala tindakan Raja Mataram terhadap daerah Priangan, selalu diberitahukan kepada Wedana Bupati, dalam hal ini Pangeran Rangga Gede. Dalam *serat piagem* itu, tidak disebut – sebut Rangga Gede atau pembesar Mataram di Priangan. Jadi menurut F. De Haan tidak mungkin *serat piagem* ditulis pada tahun 1633 Masehi.

Pada waktu bersamaan, Sultan Agung Mataram menunjuk pula Tumenggung Wiradadaha menjadi Bupati Sukapura dan Tumenggung Tanubaya menjadi Bupati Parakanmuncang. Kala itu, jabatan bupati disebut pula sebagai

Mantri Agung. Adapun pusat pemerintahan Kabupaten Bandung saat itu berada didaerah "*Krapyak"*, sebuah daerah yang tidak jauh dari aliran sungai Citarum diseputar kawasan DayeuhKolot sekarang. Dalam istilah Belanda, DayeuhKolot disebut dengan nama *"Oude Negorij"*, atau Negara Lama. Pada masa sekarang daerah itu dinamakan Kampung Citeureup yang berada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot.

Saat Kabupaten Bandung dibentuk, jumlah penduduk hanya berkisar 300 cacah atau jiwa yang tersebar di 14 daerah. Pada masa kekuasaan Mataram, daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung meliputi :

1. Tatar Ukur yang terdiri Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo dan Ujungberung.
2. Kuripan.
3. Sagaraherang.
4. Sebagian Tanahmedang.

Setelah ditetapkan sebagai penguasa Bupati atau Mantri Agung, ada beberapa hak istimewa yang dimiliki para Bupati di Priangan termasuk Kabupaten Bandung selama masa kekuasaan Sultan Agung Mataram, diantaranya :

1. Hak Pemilik Tanah
2. Hak Penguasaan dan Pengabdian dari Penduduk
3. Hak Memungut Pajak
4. Hak atas Priangan dan Berburu
5. Hak untuk Menentukan Hukum Sendiri

Hak–hak istimewa tersebut pada tahun 1677 diambil oleh *VOC* seiring dengan penyerahan sebagian wilayah kekuasaan ini, diangggap sebagai balas jasa kepada *VOC* karena telah ikut membantu dalam penumpasan pemberontakan Trunojoyo. Adapun wilayah Priangan yang diserahkan kepada *VOC* meliputi : Kabupaten Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang. Penyerahan wilayah kekuasaan dilakukan Sultan Agung Mataram Susuhunan Amangkurat II kepada Admiral Speelman dari pihak *VOC.*

Dengan diserahkannya Priangan tengah ke *VOC*, maka secara otomatis Kabupaten Bandung berada dibawah genggaman *VOC* atau kompeni Belanda. Namun demikian pengambil alihan kekuasaan tidak berlangsung cepat. Karena pada tanggal 15 November 1684, Komandan Jacob Couper dan Kapten Joachung Michiel atas perintah Gubernur Jenderal Johanes Camphuijs melakukan reorganisasi wilayah Priangan menjadi 7 (Tujuh) Kabupaten, meliputi :

1. Kabupaten Bandung.
2. Kabupaten Sumedang.
3. Kabupaten Timbanganten.
4. Kabupaten Sukapura.
5. Kabupaten Parakanmuncang.
6. Kabupaten Imbanagara.
7. Kabupaten Kawasen.

Selain melakukan reorganisasi wilayah, *VOC* melakukan pula sistem *“Preanger Stelsel”* atas daerah Priangan sistem ini sengaja diberlakukan *VOC*, karena tujuan pokok *VOC* di daerah Priangan bukan melakukan Pemerintahan

langsung, namun lebih banyak berinisiatif memungut hasil perdagangan untuk kepentingan mereka. Namun demikian untuk memperkuat legitimasi kekuasaan *VOC* ditanah Priangan, maka dikeluarkan *"Acta Van Aanstlellingen"* semacam surat pengangkatan sebagai Bupati yang dikeluarkan *VOC.*

Dengan keluarnya akta tersebut, maka para Bupati Tanah Priangan mempunyai kewajiban menyerahkan upeti kepada *VOC*. Upeti tersebut berupa komoditas perdagangan seperti kayu, lada, nila (indigo), kapas, kopi, serta gula yang besarnya ditentukan sendiri oleh *VOC.*

Kabupaten Bandung sempat mengalami beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Bahkan dalam bukunya perkembangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Dari masa ke masa) yang disusun oleh R.H Lily Sumantry, H. Sulaeman Anggapraja dan H Ahmad Syafei, membagi masa Pemerintahan Kabupaten Bandung kedalam beberapa periode, masing – masing :

1. Kabupaten Bandung masa Padjajaran.
2. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Islam.
3. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Sumedang Larang.
4. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan VOC.
5. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Aria Cirebon.
6. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Daendles.
7. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Raffles.
8. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Belanda dari tahun 1816 s/d 1942.

Periode 1794 - 1829 saat Kabupaten Bandung dibawah perintah Bupati R A Wiranatakusumah II (Dalem Kaum), terjadi perpindahan pusat pemerintahan dari Krapyak ke suatu daerah di tepian Sungai Cikapundung (Alun-alun Kota Bandung sekarang). Perpindahan tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang berkuasa di Pulau Jawa tahun 1808-1811. Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, berkaitan dengan dibangunnya Jalan Raya Pos (de Grote Postweg) mulai dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) sepanjang ± 1.000 km yang digagas Daendels. Jalan raya pos selanjutnya digunakan untuk kepentingan mobilisasi tentara Hindia Belanda di Pulau Jawa.

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1986 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Soreang, menjadi titik awal pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dari lokasi alun-alun Kota Bandung sekarang ke Soreang. Maka tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 April 1989 pusat Ibukota Kabupaten Bandung resmi berpindah ke Soreang. Saat itu Kabupaten Bandung dibawah pemerintahan Kol. (inf) H. D Cherman Effendi. Berikut perjalanan masa jabatan Para Bupati Kabupaten Bandung :

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, Sultan Agung menetapkan menetapkan Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M) sebagai Bupati atau mantra Agung pertama.

Sementara Tumenggung Wiradadaha menjadi Bupati Sukapura dan Tumenggung Tanubaya sebagai Bupati Parakanmuncang. Dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung.

Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 -1704. Kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704 - 1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. Sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar

Anggadiredja II (1707 - 1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 - 1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794 - 1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemindahan

Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874) Ibukota Kabupaten Bandung Berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan dalem bintang.

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini Ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di Ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanegara (1893 - 1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21

Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912 - 1931 sebagai Bupati yang ke 12 dan berikutnya tahun 1935 – 1945 sebagai Bupati yang ke 14. Pada periode tahun 1931 - 1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke 13. Selanjutnya pejabat Bupati ke 15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945 - 1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias aom Male (1948 - 1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke 17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956 - 1957). Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960 - 1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi.

Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke - 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 - 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985 - 1990), Ibukota Kabupaten Bandung

pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut - sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992.

Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna S.IP terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat Pemerintahan.Tahun 2003 semua aparat Daerah, kecuali Dinas Pekerjaan umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di komplek perkantoran Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan H. Obar Sobarna S.IP telah dibangun Stadion Olahraga si Jalak Harupat, yaitu stadion bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu pada masa pemerintahan H. Obar Sobarna, S.IP berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi Kota Otonom. Tanggal 5 Desember 2005. H. Obar Sobarna, S.IP menjabat Bupati Bandung untuk kedua kalinya didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati, melalui proses pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Dimasa pemerintahan H.Obar Sobarna,

S.IP yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis sudah terbentuk Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Visi & quot ; Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa," Kabupaten Bandung bertekad untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hingga usia 365 tahun, Kabupaten Bandung telah diperintah oleh 27 Bupati, dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Nama-nama Bupati Bandung

NO	NAMA-NAMA BUPATI BANDUNG	MASA JABATAN
1	Tumenggung Wira Angun-angun	Tahun 1641-1670
2	Tumenggung Nyili	Tahun 1670-1681
3	Tumenggung Ardikusumah	Tahun 1681-1704
4	Tumenggung Ardisuta (Tumenggung Anggadiredja I)	Tahun 1704-1747
5	Demang Natapradja (Tumenggung Anggadiredja II)	Tahun 1747-1763
6	Tumenggung Anggadiredja III (Wiranatakusumah I)	Tahun 1763-1794
7	R.A. Wiranatakusumah II (Dalem Kaum)	Tahun 1794-1829

NO	NAMA-NAMA BUPATI BANDUNG	MASA JABATAN
8	R.A. Wiranatakusumah III (Dalem Karang Anyar)	Tahun 1829-1846
9	R A. Wiranatakusumah IV (Dalem Bintang)	Tahun 1846-1874
10	R.A. Kusumadilaga (Dalem Marhum)	Tahun 1874-1893
11	R.A.A. Martanegara	Tahun 1893-1918
12	R.H.A.A. Wiranatakusumah V (Dalem Haji)	Tahun 1920-1931
13	R.T. Hasan Sumadipradja	Tahun 1931-1935
14	R.H.A.A. Wiranatakusumah V	Tahun 1935-1945
15	R.T.E. Suriaputra	Tahun 1945-1947
16	R T M Wiranatakusumah VI (Aom Male)	Tahun 1948-1956
17	R. Apandi Wiradiputra	Tahun 1956-1957
18	Letkol Inf. H. Memed Ardiwilaga	Tahun 1960-1967
19	Kol. Inf. (Anumerta) Masturi	Tahun 1967-1969
20	Letkol CAJ. R.H. Lily Sumantri	Tahun 1969-1975 (I)
21	Letkol CAJ. R.H. Lily Sumantri	Tahun 1975-1980 (II)
22	Kol. Inf. Sani Lupias Abdurrahman	Tahun 1980-1985
23	Kol. CHI. J. D Cherman Effendi	Tahun 1985-1990
24	Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.IP	Tahun 1990-1995 (I)
25	Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.IP	Tahun 1995-2000 (II)
26	Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S. IP	Tahun 2000-2005 (I)
27	Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S. IP	Tahun 2005-2010 (II)
28	H. Dadang Moh Naser, S.H, S.IP	Tahun 2010-Sekarang

Sumber: Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung

Berikut ini foto-foto Bupati Bandung yang pernah menjabat di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Gambar 1.1
Foto-foto Bupati Bandung



Sumber: Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung

1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

1.2.1 Visi Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung memiliki Visi yaitu Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan.

1.2.2 Misi Kabupaten Bandung

Misi dari Kabupaten Bandung adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokasi *(Good Goverment and clean Goverment).*
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Memantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa).
3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Menggali, Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya Sunda serta Kearipan Lokal Lainnya.
5. Memantapkan Pembangunan Pedesaan
6. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah.
7. Meningkatkan Partisifasi Sektor Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.

1.2.3 Logo Kabupaten Bandung

Berikut ini logo Kabupaten Bandung yang terdiri dari beberapa lambang yang mempunyai arti dan maksud tersendiri.

Gambar 1.2

Logo Kabupaten Bandung



Sumber: Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung

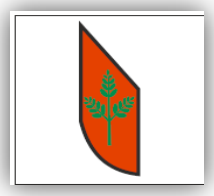
Lambang Kabupaten Bandung berbentuk perisai terbagi atas lima bagian, yaitu:



1. Latar belakang emas dengan gambar gunung (Gunung Tangkuban Perahu), berwarna hijau. Melambangkan bahwa Kabupaten Bandung termashur karena tanahnya yang subur di daerah bergunung-gunung dan sebagai ciri memiliki Gunung Tangkuban Perahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang.



2. Bagian yang melintang dengan bergerigi merupakan bentuk bendungan kokoh kuat berwarna hitam. Melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh kuat, baik, secara fisik secara dalam membendung air maupun membendung hawa nafsu.



3. Pohon kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah, melambangkan bahwa di tatar Kabupaten Bandung memiliki lahan perkebunan yang cukup luas dan perkebunan kina di Kabupaten Bandung yang terluas di Asia dengan kualitas baik.



4. Garis-garis bergelombang berwarna putih dan biru. Melambangkan di Kabupaten Bandung dilintasi oleh Sungai Citarum, Cikapundung dan sungai kecil lainnya serta memiliki danau (situ) Patenggang dan Cileunca.



5. Didalam lambang ini terdapat tulisan **REPEH RAPIH KERTARAHARJA**.

   Repeh artinya Suasana kehidupan yang aman dan tentram.

   Rapih artinya Suasana kehiudpan yang rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan asri.

   Kertaraharja artinya Tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbanng, serasi, adil, dan merata.

Kabupaten Bandung, merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat, Indonesia, yang memiliki beberapa wilayah didalamnya, yang dimana setiap

daerah atau wilayahnya memiliki potensinya masing-masing, Ibu Kota dari Kabupaten Bandung adalah Soreang.

Berikut ini peta wilayah dari Kabupaten Bandung, yang terdiri dari beberapa wilayah:

Gambar 1.3
Peta Wilayah Kabupaten Bandung



Sumber: Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung

1.3 Sejarah Divisi Humas Kabupaten Bandung

Sejarah divisi humas pada awalnya berada di bawah bagian umum, yang kemudian dengan seiring berjalannya waktu pada tahun 1983 disetiap sekretariat daerah tingkat II di Jawa Barat dibentuklah humas yang membawahi tiga sub bagian, diantaranya:

1. Sub bag Pemberitaan
2. Sub bag Evaluasi
3. Sub bag dokumnetasi

Alasan utama mengapa divisi humas dibentuk adalah karena ini semua tidak terlepas kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi, karena sejak mulai dari tahun 1980 informasi sudah mulai berkembang, kebutuhan akan informasipun meningkat.

Pembentukkan divisi humas dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui informasi-informasi terbaru dari pemerintahan, melalui sebuah saluran yaitu media, yang pada saat itu media yang digunakannya dan sedang berkembang adalah radio. Pada saat itu fungsi humas sebagai pemberi informasi sudah dijalankan.

Pada tahun 2002, bagian humas dilebur dan disatukan dengan mantan Deppen (Departemen Penerangan) karena sebelumnya humas masuk dalam bagian Departemen Penerangan yang kemudian dibubarkan pada masa jabatan K.H Abdurrahman Wahid, namun pada tahun 2002 bagian humas kembali disatukan dengan mantan Departemen Penerangan, yang kemudian berganti nama menjadi BPID (Badan Penerangan Informasi Daerah). Pada tahun 2008 BPID

(Badan Penerangan Informasi Daerah) kembali dibubarkan, yang pada akhirnya humas dirintis dan dibentuk kembali dibawah naungan divisi Setda (Sekretariat Daerah) yang dibawahi langsung oleh Asisten III yaitu Asisten Administrasi sampai sekarang.

1.3.1 Tujuan Humas Pemerintah Kabupaten Bandung

Tujuan Humas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan adalah untuk:

1. Meningkatkan penyampaian berbagai informasi di wilayah Kabupaten Bandung yang akurat dan mutakhir pada masyarakat Kabupaten Bandung.
2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas informasi menuju pemulihan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

1.4 Struktur Organisasi Kabupaten Bandung

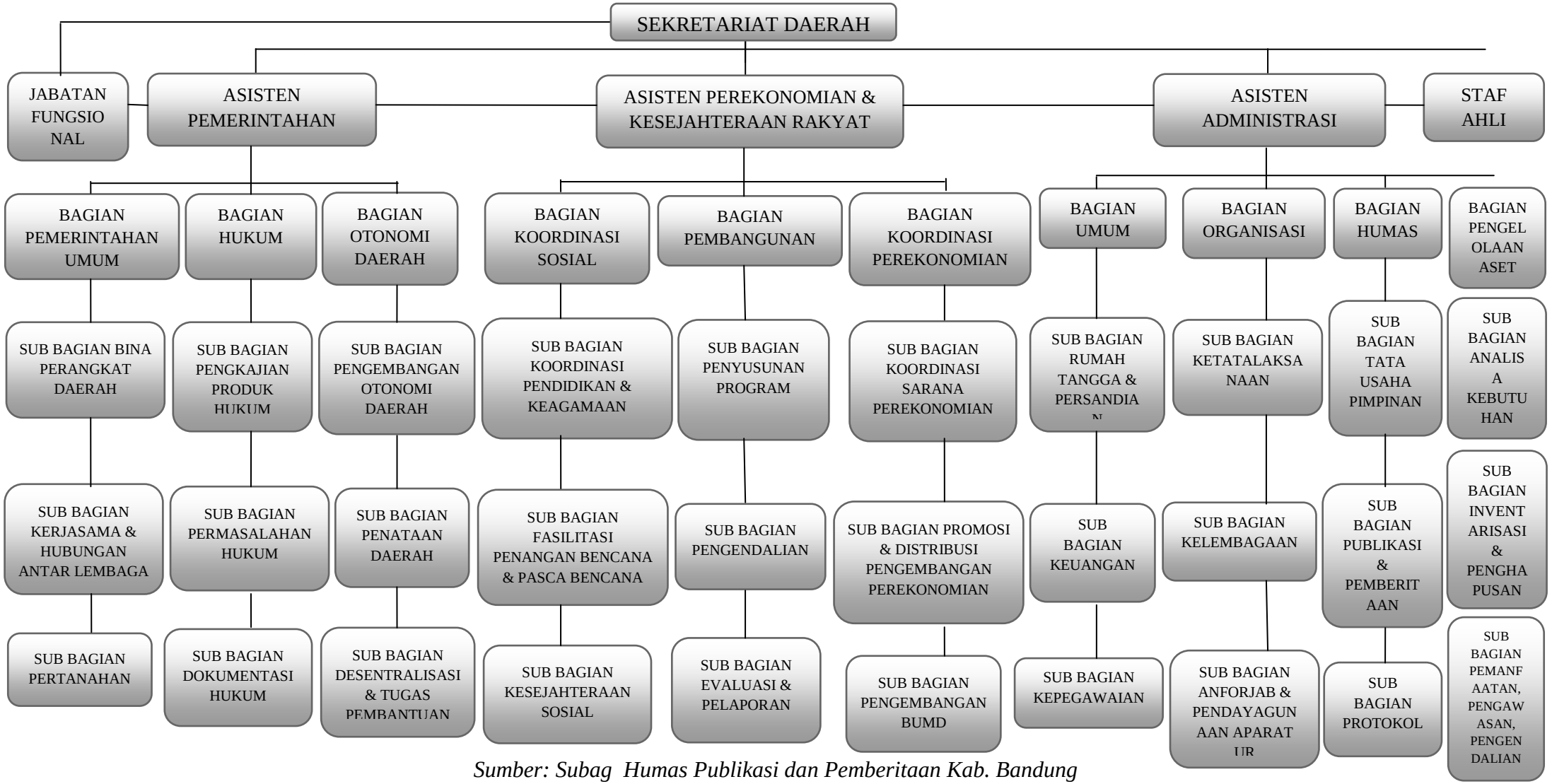
Struktur organisasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Karena berkaitan dengan sistem birokrasi dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi ini bertujuan agar sistem birokrasi perusahaan bisa berjalan dengan baik dan juga teratur. Suatu organisasi disyaratkan memiliki suatu jenjang jabatan atau kedudukan sehingga setiap individu memiliki perbedaan posisi yang jelas, serta memiliki pembagian kerja yang jelas sehingga setiap individu memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh komponen yang

ada didalam perusahaan untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena tujuan dari perusahaan terdiri tugas-tugas yang diberikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga memiliki struktur organisasi yang salah satu tujuan dari struktur ini adalah membantu pekerjaan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam menjalani tugasnya sebagai pimpinan di Kabupaten, yang pada hal ini pekerjaan Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh seorang Sekda (Sekretariat Daerah).

Berikut ini struktur organisasi yang ada di Kabupaten Bandung:

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Kabupaten Bandung

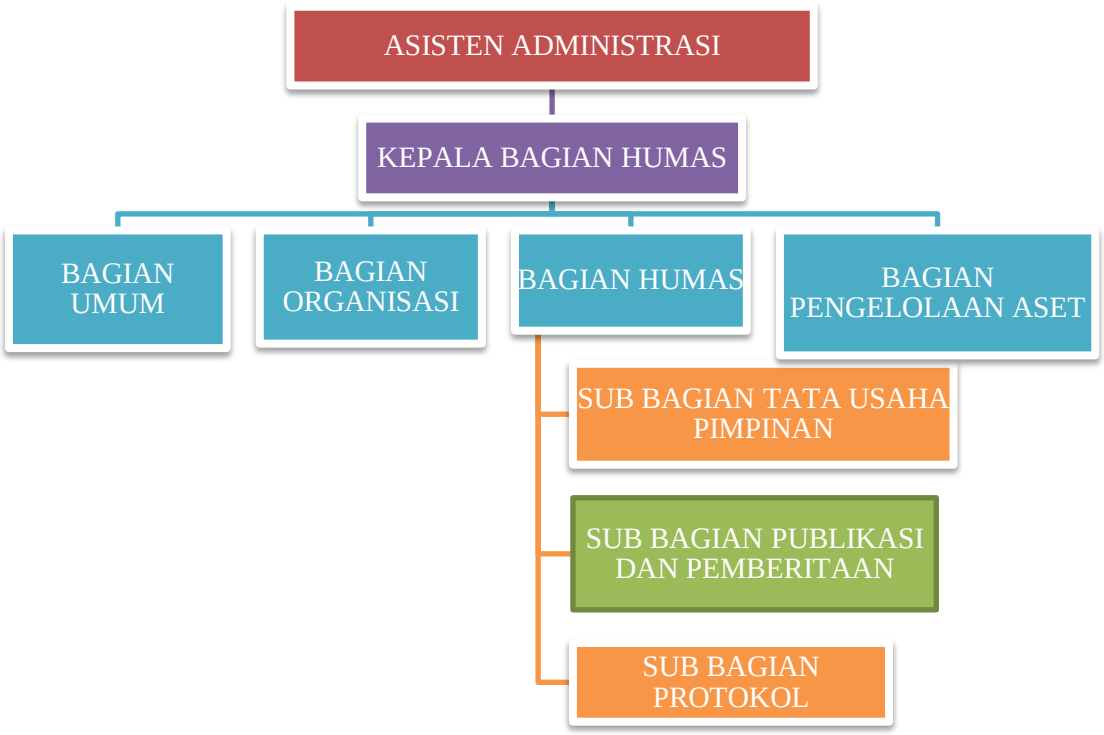


Sumber: Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung

1.5 Struktur Bagian Humas Kabupaten Bandung

Gambar 1.5

Struktur Bagian Humas Kabupaten Bandung



Sumber: Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung

Dari gambar diatas bahwa struktur organisasi Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bandung berada dibawah naungan Asisten Administrasi, Bagian Humas pada saat melaksanakan tugasnya dibantu oleh sub bagian lain yang masih dalam satu naungan Asisten Administrasi, yang diantaranya adalah Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, dan Sub Bagian Protokol.

1.5.1 Susunan Organisasi Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Bandung

Susunan organisasi yang berada pada naungan Asisten Administrasi adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum, Membawahi:
    - Sub Bagian Rumah Tangga dan Ppersandian
    - Sub Bagian Keuangan
    - Sub Bagian Kepegawaian
2. Bagian Organisasi, Membawahi:
    - Sub Bagian Ketatalaksanaan
    - Sub Bagian Kelembagaan
    - Sub Bagian Kepegawaian
3. Bagian Humas, Membawahi:
    - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
    - Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan
    - Sub Bagian Protokol
4. Bagian Pengelolaan Aset, Membawahi:
    - Sub Bagian Analisa Kebutuhan
    - Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
    - Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian

Bagian-bagian inilah yang dibawahi langsung oleh Asisten Administrasi termasuk Bagian Humas, yang nanti pada saat melaksanakan tugasnya bagian-

bagian ini akan saling membantu satu sama lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

1.6 Job Description Bagian Humas Kabupaten Bandung

Job description merupakan tugas-tugas pokok yang harus dijalani oleh semua pihak yang terkait didalamnya termasuk pimpinan sekalipun. Untuk kali ini Job description yang akan dijelaskan pada Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bandung dimulai dari Asisten Administrasi selaku Pimpinan yang menaungi Bagian Humas.

1.6.1 Job Description Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Fungsi Asisten Administrasi:

1. Asisten Administrasi mempunyai fungsi penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah.

2. Asisten Administrasi mempunyai fungsi perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah.
3. Asisten Administrsi mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan,ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah.

1.6.2 Job Descriotion Kepala Sub Bagian Humas

Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah.

Fungsi Kepala Sub Bagian Humas:

1. Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah.
2. Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah.
3. Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi pengkoordinasian dalam pelaksanaan pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah.

4. Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan administratif pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah.

1.6.3 Job Description Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan.

Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi pengelolaan administrasi tata usaha pimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi penyusunan pelaporan kegiatan ketatausahaan pimpinan Sekretariat Daerah.

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian.

1.6.4 Job Description Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan

Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan.

Fungsi Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan:

1. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan.
2. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi penyusunan rumusan kebijakan di bidang publikasi dan pemberitaan.
3. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi pelaksanaan analisa umpan balik di bidang publikasi dan pemberitaan.
4. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi pelaksanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah.

5. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pemberitaan dan kehumasan pemerintah daerah.
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemberitaan dan kehumasan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan pembinaan pers
8. Pengkoordinasian pelakanaan pemberitaan dan kehumasan pemerintah daerah.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintah, pemerintah provinsi, dan instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan.

1.6.5 Job Description Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah.

Fungsi Kepala Sub Bagian Protokol:

1. Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah.
2. Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan pemberian pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah.
3. Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan persiapan dan koordinasi kegiatan keprotokolan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintahan, pemerintah provinsi, dan instansi terkait dalam pelayanan keprotokolan pemerintah daerah.

1.7 Sarana dan Prasarana

1.7.1 Sarana Humas Setda Kabupaten Bandung

Letak kantor Humas Setda Pemerintah Kabupaten Bandung terletak di tengah – tengah Komplek Pemda Kabupaten Bandung, disebelah Gedung Moch. Toha (Gedung yang selalu digunakan apabila Pemerintah Kabupaten Bandung mengadakan acara). Terletak satu gedung dengan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Kantor Humas merupakan tempat melayani kebutuhan informasi khususnya mengenai Pemerintahan Kabupaten Bandung dan kegiatannya.

Sarana yang dimiliki Subag Humas Setda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana yang terdapat pada Bagian Humas

NO	NAMA BARANG	UNIT	KETERANGAN
1	Mobil	3	Baik
2	Sepeda Motor	16	Baik
3	Meja Kerja Pejabat	2	Baik
4	Kursi Kerja Pejabat	2	Baik
5	Meja Kerja Non Struktural	29	Baik
6	Kursi Kerja Non Struktural	29	Baik
7	Filling Kabinet	18	Baik
8	Perangkat Komputer	9	Baik

NO	NAMA BARANG	UNIT	KETERANGAN
9	Telepon	2	Baik
10	Lemari Buku	8	Baik
11	Mesin Tik	4	Kurang Baik
12	Mesin Tik Elektrik	1	Kurang Baik
13	Mesin Foto Copy	2	Kurang Baik
14	Kursi Tamu	4	Baik
15	Televisi	3	Baik
16	Laptop	3	Baik
17	Infocus	1	Baik
18	Kulkas	1	Baik
19	Kamera Video	3	Baik
20	Kamera Foto	2	Baik
21	Tripod	1	Baik
22	Rak Arsip	16	Baik
23	Lemari Besi	1	Baik
24	Dispenser	1	Baik

Sumber: Subag Humas Tata Usaha Pimpinan Kab. Bandung

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sarana yang ada pada Bagian Humas cukup memfasilitasi Bagian Humas untuk dapat bekerja secara optimal ketika menjalani tugasnya, termasuk Kepala Bagian Humas.

Berikut ini daftar sarana yang ada pada ruangan Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bandung.

Tabel 1.3
Sarana Ruangan Kepala Bagian Humas

NO	NAMA BARANG	UNIT	KETERANGAN
1	Meja Kerja	1	Baik
2	Kursi Kerja	1	Baik
3	Kursi Tamu	1	Baik
4	Filling Kabinet	1	Baik
5	Lemari Buku	1	Baik
6	Lemari Pakaian	1	Baik
7	Bupet Buku	1	Baik
8	Televisi	1	Baik
9	Kulkas	1	Baik

Sumber: Subag Humas Tata Usaha Pimpinan Kab. Bandung

Berhubung penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan maka penulis ingin memberikan gambaran lebih jelas mengenai sarana yang terdapat pada ruangan Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan dan sarana yang terdapat pada ruangan Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan, berikut ini sarana apa saja yang terdapat pada ruangan Kepala Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan:

Tabel 1.4
Sarana Ruangan Kepala Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan

NO	NAMA BARANG	UNIT	KETERANGAN
1	Meja+Kursi Kerja	1	Baik
2	Meja Kayu	2	Baik
3	Kursi Kayu	2	Baik
4	Mesin Tik	1	Baik
5	*Whiteboard*	1	Baik
6	Peta	1	Baik
7	Komputer+Printer	1	Baik

Sumber: Arsip Penulis, 2011

Kemudian sarana yang berada diruangan Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan Setda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5
Sarana Ruangan Kerja Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan

NO	NAMA BARANG	UNIT	KETERANGAN
1	Komputer	4	Baik
2	Printer	2	Baik
3	Meja+Komputer	4	Baik
4	Meja Kayu	4	Baik
5	Kursi Kayu	6	Baik

NO	NAMA BARANG	UNIT	KETERANGAN
6	Meja+Kursi Tamu	1	Baik
7	Lemari Kaca	4	Baik
8	Televisi	1	Baik
9	Modem	1	Baik
10	*Filling Kabinet*	3	Baik
11	Kamera Video	3	Baik
12	Kamera Foto	2	Baik
13	Tripod	1	Baik
14	*Whiteboard*	1	Baik

Sumber: Arsip Penulis, 2011

1.7.2 Prasarana Humas Setda Kabupaten Bandung

Selain sarana yang dimiliki oleh Subag Humas Setda Kabupaten Bandung, Subag Humas Juga memiliki Prasarana yang akan menunjang para karyawan yang ada di Subag Humas Setda Kabupaten Bandung untuk jauh lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya, berikut ini prasarana yang ada pada Subag Humas Setda Kabupaten Bandung:

Tabel 1.6
Prasarana yang terdapat pada Bagian Humas

NO	PRASARANA
1	Ruangan Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bandung
2	Ruangan Kepala Subag Humas Tata Usaha Pimpinan
3	Ruangan Kerja Subag Humas Tata Usaha Pimpinan
4	Ruangan Kepala Subag Humas Protokol
5	Ruangan Kerja Subag Humas Protokol
6	Ruangan Kepala Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan
7	Ruangan Kerja Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan
8	Ruangan Beribadah (Mushola)
9	Kamar Mandi
10	Ruang Gudang
11	Ruang Dapur
12	Lapangan Parkir

Sumber: Arsip Penulis, 2011

1.8 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

1.8.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi praktek kerja lapangan penulis berada di Pemerintahan Kabupaten Bandung di Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan Setda Kabupaten Bandung yang bertempat di Kompek Pemda Jalan Raya Soreang – KM 17 Kab Bandung, Tlp. (022) 5891191, 5891192, 5891143 Fax. (022) 594, Soreang 40911. Alamat Website : http://www.bandungkab.go.id

1.8.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis ikuti yaitu selama 44 Hari. Adapun pelaksanaan PKL itu sendiri dimulai sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai 09 September 2011 di Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat yang dimulai sejak pukul 08.00 – 16.00 WIB sesuai dengan jam kerja pegawai, kecuali di Bulan Ramadhan penulis masuk pukul 08.00 – 14.30 WIB, tetapi apabila ada kegiatan diluar jam kerja, penulis mengalami penambahan jam kerja sesuai dengan kegiatan yang dihadiri oleh penulis.